



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kebijaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan Nasional

**Direktorat
Kebudayaan**

93

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Perpustakaan
Direkturat Perdagangan dan
Pembinaan Perdagangan
Sejarah dan Peradaban

KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

306 4

PPA

K

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1993**

PERPUSTAKAAN
Direktorat Perlindungan dan Penyelenggaraan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala
NO INDUK
TGL.

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.

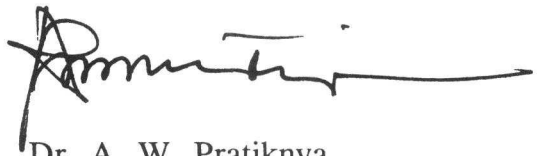
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah
Kelompok Kerja Pemasyarakatan
Kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. W. Pratiknya', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. A. W. Pratiknya



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
I. Pendahuluan	1
II. Landasan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional	2
A. Rasional	2
B. Landasan Yuridis	3
III. Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional	4
IV. Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional pada PJPT II	15
V. Program-Program dalam Repelita VI	29
A. Program-Program Pokok	30
B. Program-Program Penunjang	37
Lampiran	40

KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

I. Pendahuluan

Pada hakekatnya, kebudayaan adalah perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam arti yang luas. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan pola bagi dan dari tingkah laku, baik tingkah laku yang nyata maupun yang tidak nyata, dan diperoleh serta diwariskan melalui proses belajar dengan menggunakan lambang-lambang.

Pengertian kebudayaan mencakup peralatan sebagai aspek kebudayaan, sedangkan inti kebudayaan itu sendiri terdiri dari gagasan-gagasan dan nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman para pendukungnya yang selanjutnya menguasai sikap dan tingkah laku pendukungnya.

Mengingat keterbatasan kemampuan jasmani dan rohani manusia untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya secara aktif, maka peralatan yang dikembangkan oleh manusia sebagai unsur kebudayaan materiil yang nyata, sangat besar artinya dalam mempermudah serta memperingan kehidupannya. Walaupun demikian, unsur

kebudayaan materiil semata tidak banyak artinya tanpa dilandasi dengan pengetahuan yang menyangkut cara pembuatannya, pengolahannya, dan penggunaannya.

Pengetahuan lain yang menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku sosial, misalnya nilai-nilai budaya, norma-norma sosial dan pandangan hidup yang dimiliki oleh manusia juga selalu digunakan dalam menghadapi lingkungannya.

Pemikiran-pemikiran tersebut di atas menjadikan kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan yang memberi makna dan arah kehidupan sosial serta sebagai mekanisme pengendali dalam membina pergaulan sosial dalam proses penyesuaian diri secara aktif terhadap lingkungannya dalam mengubah dan menciptakan lingkungan baru yang lebih serasi baik dengan tuntutan kebutuhan jasmani maupun kebutuhan budaya yang timbul kemudian.

II. Landasan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional

A. Rasional

Kebudayaan suatu suku bangsa dan daerah yang berlaku dalam kelompok sosial terwujud karena hubungan kekerabatan serta kelompok-kelompok sosial yang mendiami suatu kesatuan wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebudayaan nasional berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dan perekat yang bersifat nasional dan yang melintas suku bangsa maupun daerah.

Kekuatan kebudayaan nasional sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa antara lain disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa kebudayaan nasional mempunyai kekuatan-kekuatan sebagai berikut.

- (1) Kebudayaan nasional dapat memberi makna dan arah kehidupan serta cita-cita bangsa;
- (2) Kebudayaan nasional merupakan kerangka acuan bagi sikap dan tingkah laku sosial dalam pergaulan antara sesama warga negara; dan
- (3) Kebudayaan nasional merupakan jati diri bangsa yang menumbuhkan rasa bangga dan mengikat segenap pendukungnya.

B. Landasan Yuridis

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (1) Pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia, beserta penjelasannya.
- (2) Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia, beserta penjelasannya.
- (3) Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan

pada Ayat (2) dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, beserta penjelasannya.

Pengertian "kepercayaannya itu" sebagaimana tersebut pada Ayat 2 di atas diartikan sebagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang ditegaskan pada Ketetapan MPR No. II Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993. Dalam hal pembinaan selanjutnya, masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1978, menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993, khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan nasional.
- (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1992, tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 5 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1992.

III. Pokok-Pokok Kebijakan dalam Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional

Pada Pasal 32 UUD 1945 dinyatakan bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional Indonesia. Pada penjelasan pasal tersebut antara lain dinyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha

budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Rumusan tersebut di atas menunjukkan bahwa kebudayaan nasional harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, berkembang terus, dan dapat menuntun ke arah perkembangan peradaban. Oleh karena itu, upaya memajukan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam harus mengarah pada peningkatan persatuan bangsa; dan bukan sebaliknya, yaitu membangun sikap kedaerahan yang sempit. Bangsa Indonesia harus bersikap terbuka tetapi selektif dan mampu mengadaptasikan bahan-bahan baru dari kebudayaan lain untuk memperkaya kebudayaan kita.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka sesungguhnya bunyi Pasal 32 UUD 1945 dan penjelasannya itu mengandung dua langkah kebijaksanaan yang mengarah pada dua sasaran. Arah yang pertama adalah pemerintah bersama-sama dengan masyarakat perlu berupaya untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya bangsa agar tidak punah, sedangkan arah yang kedua adalah perlunya memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Agar kedua arah tersebut tidak terus menerus bertolak belakang, maka kebijaksanaan untuk memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 adalah berupaya



menciptakan iklim agar kedua arah tersebut dapat terpadu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengembangan.

Langkah-langkah yang bersifat pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan mempersiapkan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan yang tanggap, tangguh, dan bertanggungjawab dalam menghadapi tantangan zaman dengan upaya menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya nasional yang sedang dikembangkan, akan tetapi juga menjadi pendukung kebudayaan yang aktif dan kreatif dalam memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsanya. Sedangkan langkah-langkah yang bersifat pengembangan dimaksudkan sebagai upaya yang ditujukan untuk mempertinggi mutu kebudayaan bangsa, memperkaya nilai-nilai dan memperkokoh identitas budaya bangsa sesuai dengan penjelasan Pasal 32 UUD 1945, serta mengupayakan tersedianya berbagai fasilitas yang dapat mendukung upaya memajukan budaya nasional.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat:

- (1) memelihara dan melindungi;
- (2) menggali dan meneliti;
- (3) mengembangkan dan memperkaya;
- (4) menyebarluaskan;

- (5) memanfaatkan;
- (6) menanggulangi pengaruh asing yang negatif; dan
- (7) kerja sama.

Penjelasan dari masing-masing kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memelihara dan Melindungi

Memelihara dan melindungi adalah upaya menanggulangi ancaman terhadap kelestarian warisan budaya, baik kebudayaan non-materiil yang berupa nilai-nilai, norma sosial, dan pandangan masyarakat maupun kebudayaan materiil (misalnya benda-benda seni dan benda cagar budaya) yang dimaksudkan agar kebudayaan tersebut tidak mengalami kerusakan, kehancuran, dan kepunahan.

Ancaman pada kebudayaan non-materiil terjadi karena makin derasnya arus pengaruh yang datang dari luar sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai, norma-norma sosial, dan pandangan hidup masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: inventarisasi, perekaman, penulisan, penerjemahan, transkripsi, pengungkapan nilai-nilai budaya bangsa dan penanaman kepada generasi penerus.

Ancaman kerusakan pada warisan benda materiil atau benda cagar budaya berasal dari atau disebabkan oleh proses alam, biologis atau kimiawi sesuai dengan hukum alam

sehingga perlu diupayakan agar usia benda-benda tersebut dapat diperpanjang. Tetapi, ancaman yang paling berbahaya justru datang dari manusia. Berbagai kasus pelanggaran, misalnya pengrusakan, penggalian liar, penggelapan, pengiriman benda-benda bersejarah ke luar negeri tanpa izin Pemerintah, dan pencurian benda-benda cagar budaya cenderung makin meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai upaya perlu dilakukan, misalnya diadakan pemeliharaan dan perawatan, konservasi, pembersihan, pemugaran, penyimpanan, dan perlindungan benda warisan budaya dari berbagai gangguan. Upaya melindungi dan memelihara benda-benda cagar budaya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 10 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992.

Salah satu jalur yang efektif untuk memelihara dan melindungi kebudayaan di Indonesia, baik budaya materiil maupun non-materiil adalah melalui jalur pendidikan. Hal ini sangat beralasan mengingat pendidikan dipandang sebagai suatu proses untuk membudayakan manusia. Proses itu berjalan dengan cara mentransfer nilai-nilai budaya kekinian, dari generasi ke generasi, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan bukan saja berfungsi untuk menjaga kesinambungan, tetapi juga berfungsi sebagai wahana pelestarian, penyerapan dan pepaduan, dan persiapan masa depan.

Pendidikan berfungsi preparatif karena melalui pendidikan dapat dilakukan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah ada. Pendidikan juga berfungsi penyerapan dan pepaduan, karena secara aktif meramu dan menggodog

nilai-nilai budaya lama dengan nilai-nilai baru, sehingga terbentuk kebudayaan yang bersifat kekinian yang menjadi milik bangsa pada saat itu.

Pendidikan berfungsi mempersiapkan kebudayaan masa depan. Fungsi yang terakhir ini dilakukan dengan jalan memperkenalkan nilai-nilai universal sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, sehingga kebudayaan nasional mampu mengantisipasi nilai-nilai yang mungkin muncul di masa mendatang.

2. Menggali dan Meneliti

Penggalian, termasuk penelitian, dapat mengandung dua macam arti. **Pertama**, menggali dalam arti mengungkap, memilah-milah, dan mengkaji warisan budaya non-materiil, yaitu nilai-nilai, norma-norma sosial, dan pandangan masyarakat guna ditawarkan dan di-pasar-kan dan selanjutnya ditanamkan kepada generasi penerus. **Arti yang kedua** adalah menggali dalam arti mengadakan ekskavasi atau menggali situs untuk mencari dan menemukan benda cagar budaya, untuk dapat diteliti, dikaji, dan diungkap latar belakang sejarahnya, sehingga dapat dipakai sebagai bahan penyusunan sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kegiatan-kegiatan penggalian dan penelitian yang dilakukan, antara lain penelitian di lapangan, penelitian di perpustakaan, ekskavasi, analisis laboratorium, revitalisasi, rekonstruksi (seni) yang hampir punah, seminar, diskusi, dan penerbitan.

3. Mengembangkan dan Memperkaya

Dalam pertemuan budaya antar suku dan antar bangsa tanpa disadari terjadi proses saling mempengaruhi dan saling mengambil alih unsur-unsur budaya yang satu dengan yang lain. Proses saling mempengaruhi dan/atau saling mengambil alih ini dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan yang bersangkutan.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas antara lain adalah mengadakan diskusi, ceramah, sarsehan, bimbingan dan penyuluhan, pengiriman atau pertukaran kebudayaan, lomba, festival, pameran, dan peragaan.

4. Menyebarluaskan

Dalam rangka pembinaan apresiasi budaya masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan budaya, maka kekayaan budaya dan hasil penggalan dan penelitian kekayaan budaya masyarakat perlu diperkenalkan dan disebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui kegiatan penyebarluasan ini, kekayaan budaya dapat diserap oleh masyarakat dan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan mendorong tumbuhnya kesatuan bangsa dan memperkuat persatuan bangsa.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, kegiatan-kegiatan dapat dilakukan melalui berbagai media (TV, radio, surat kabar/majalah), dengan pembuatan rekaman film, video, gambar/foto, slide, penerbitan buku, pameran, pagelaran, ceramah, bimbingan dan penyuluhan.

5. Memanfaatkan

Budaya Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah merupakan modal dasar dan faktor yang dominan untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan nasional perlu dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan bagi kelangsungan kebudayaan bangsa, misalnya dilakukan dengan cara memanfaatkan warisan budaya sebagai obyek pariwisata dan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan dan kebudayaan mempunyai kaitan kemanfaatan yang erat. Misalnya, suksesnya pendidikan antara lain ditunjang oleh potensi kebudayaan bangsa; sebaliknya, hidup dan majunya kebudayaan disebabkan oleh keberhasilan pendidikan. Untuk membentuk manusia sadar budaya yang mampu memahami, menghayati, dan mengembangkan kebudayaan nasional maka pendidikan perlu diselenggarakan dalam suasana yang penuh kebebasan untuk memilih dan terbuka untuk menerima. Dengan demikian, siswa akan mampu meneliti, mengkaji, meng-apresiasi, dan mengembangkan kebudayaan nasional serta mampu mengembangkan kreativitas.

Kegiatan-kegiatan lomba, festival, sayembara, pelatihan dan pagelaran, dan pameran berbagai cabang seni di berbagai jenjang sekolah sangat efektif untuk dimanfaatkan guna menumbuhkan kesadaran berbudaya sehingga perlu diupayakan agar sekolah dapat menjadi pusat kegiatan kebudayaan.



Peran kurikulum dalam proses membentuk manusia yang berbudaya Indonesia melalui pendidikan sangat menentukan, baik kurikulum yang bersifat nasional maupun yang bersifat lokal. Unsur-unsur kebudayaan yang tertuang dalam mata pelajaran, seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Sejarah Nasional dan Umum, serta Kerajinan Tangan dan Kesenian/Kebudayaan, pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan kebudayaan dalam pembentukan jati diri bangsa dan perekonomian untuk kesinambungan dan pengembangan kebudayaan.

Di samping itu, kebudayaan harus menjadi acuan para pendidik seperti diamanatkan pada Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 1989 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan harus bersikap menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan sulit untuk dipisahkan. Oleh karena itu, berbagai fasilitas kebudayaan yang berada di luar lingkungan pendidikan, seperti museum, taman budaya, pusat kesenian, sanggar seni, padepokan, perpustakaan, obyek peninggalan sejarah dan purbakala, dan sebagainya perlu dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pendidikan dalam membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan berbudaya Indonesia.

6. Menanggulangi Pengaruh Asing yang Negatif

Pengaruh kebudayaan asing baik materiil maupun non-materiil dapat masuk dari arah mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Sebagai akibat dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keberhasilan pembangunan maka kontak-kontak budaya tidak mungkin dihindari.

Demikian gencarnya kontak-kontak tersebut sehingga kita hampir-hampir tidak diberi kesempatan untuk memilih atau menolak hal-hal mana yang cocok dan hal-hal mana yang tidak. Kontak-kontak kebudayaan seolah-olah menjadi kontak-kontak yang bersifat "terpaksa" daripada kontak-kontak yang bersifat manasuka.

Pancasila, di samping sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, juga merupakan perjanjian luhur bagi Bangsa Indonesia sehingga seluruh rakyat harus memahami, menghayati, mentaati, dan mengamalkannya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Dalam perjalanan sejarah, Pancasila telah terbukti keampuhannya dalam menyaring dan menangkal masuknya kebudayaan asing yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kelestarian kebudayaan bangsa. Lima sila yang mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari telah tumbuh sebagai norma yang mengatur dapat diterima atau tidaknya kebudayaan asing, antara lain dilihat dari norma hukum, kesopanan, kesusilaan, tatakrama, dan norma-norma lain yang bersumber pada Pancasila. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya untuk:

- (1) menanamkan keyakinan bahwa kita memiliki kepribadian dan kedaulatan budaya sendiri;
- (2) menanamkan sikap keterbukaan dan kesediaan untuk mengakui dan menghargai kepribadian dan kedaulatan bangsa lain; dan
- (3) menanamkan sikap kritis dan selektif terhadap masuknya kebudayaan asing.

7. Kerja sama

Sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, kontak budaya antar suku dan antar bangsa sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, kerja sama kebudayaan perlu diarahkan agar bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu dapat saling mengembangkan dan memperkaya kebudayaannya masing-masing. Bahkan hubungan kebudayaan antar bangsa dapat memberikan dampak positif bagi hubungan diplomatik atau lebih dikenal dengan istilah diplomasi bermatra kebudayaan.

Penyelenggaraan kerja sama, baik secara bilateral, multilateral, maupun regional telah dilaksanakan dengan kegiatan pertukaran dan pengiriman misi kebudayaan/kesenian, pameran, peragaan, seminar, diskusi, dan workshop.

Kerja sama bilateral dalam bidang kebudayaan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a) kerja sama yang dilandasi dengan perjanjian, dan
- b) kerja sama yang tidak dilandasi dengan perjanjian; dan diadakan atas dasar kebutuhan khusus dengan membuat perjanjian secara khusus untuk setiap kegiatan.

Kerja sama multilateral diselenggarakan dengan berbagai negara yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh badan tertentu, misalnya UNESCO. Sedangkan kerja sama regional dilakukan dengan negara-negara tetangga se-Asia Tenggara, seperti: ASEAN Committee on Cultural and Information (COCI), Seameo Project in Archeology and Fine

Art (SPAFA), Asian Cultural Centre for Unesco (ACCU), dan sebagainya.

Di samping itu, juga dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi/yayasan/lembaga asing (antara lain the Japan Foundation, the Ford Foundation) dan berbagai instansi/yayasan/lembaga dalam negeri baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

IV. Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan Nasional pada PJPT II

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih menghadapi sejumlah masalah yang harus dipecahkan dalam perkembangan dan tuntutan pembangunan dalam PJPT II yang diawali dengan Repelita VI. Berbagai kecenderungan masa depan serta masalah yang akan timbul seiring dengan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara nasional, regional, maupun global membangkitkan tantangan yang harus dijawab dalam pembangunan kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tantangan, kendala dan peluang serta kebijaksanaan pembangunan kebudayaan dalam PJPT II adalah sebagai berikut.

1. Tantangan

Sejak Pelita IV dunia dilanda oleh gejolak yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan dan masih akan

berlangsung pada PJPT II. Interaksi antar bangsa yang didorong oleh pesatnya kemajuan iptek, terutama teknologi komunikasi dan transportasi, mengakibatkan derasnya arus informasi dan masuknya nilai-nilai budaya asing dari luar negeri yang tidak selalu sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan nilai-nilai luhur lainnya melalui siaran televisi dari luar, film, dan bahan bacaan dari media lain, merupakan ancaman bagi pembangunan budaya nasional. Hal itu dapat mengakibatkan terjadinya pendangkalan nilai-nilai moral dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang pada gilirannya dikuatirkan akan mengakibatkan terjadinya krisis jati diri dan kepribadian bangsa.

Di pihak lain, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mempunyai daya tangkal yang handal dan kemampuan untuk memilih dan memilah berbagai pengaruh dari luar sehingga dampak negatif globalisasi senantiasa dapat dihindari. Sehubungan dengan hal itu, maka **tantangan pertama** yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan nasional adalah bagaimana memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga mempunyai ketahanan sosial budaya yang tangguh dan handal.

Sementara itu, proses pembangunan belum sepenuhnya mampu mengikis dan menangkal paham kedaerahan yang sempit, sikap feodal dan eksklusif serta individualistik. Derasnya urbanisasi yang mengakibatkan padatnya penduduk di perkotaan, antara lain menumbuhkan gejala persaingan yang tidak sehat dan budaya negatif lainnya yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertikaian paham dan perpecahan antar anggota dan kelompok masyarakat. Nilai-

nilai tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong, kebersamaan, serta silih asah, silih asuh, dan silih asih. Sehubungan dengan hal ini maka **tantangan kedua** yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah bagaimana meningkatkan dan memperkuat jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat utama guna menjalankan pembangunan.

Masalah lain yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan bangsa adalah masih rendahnya penghayatan masyarakat terhadap kekayaan dan keluhuran nilai seni budaya bangsa, terutama seni tradisional. Dewasa ini, terdapat kecenderungan makin deras nya arus masuk seni budaya asing yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa ke dalam masyarakat kita. Selain itu, penghargaan terhadap karya cipta seni dan seniman yang mendorong semangat untuk mengembangkan kreativitas seni belum merata. Hal itu menyebabkan pula terbatasnya karya seni yang bermutu, termasuk karya sastra besar yang dilahirkan. Sehubungan dengan hal ini maka tantangan ketiga yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan iklim yang mendorong seluruh masyarakat agar lebih menghargai seni budaya bangsa dan menjaga kelestarian serta mendorong karya seni baru yang bermutu.

Dalam pada itu, dengan semangat kebangkitan nasional kedua dalam masa PJPT II yang pada tingkat global ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan iptek diperlukan manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas yang mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek dengan tetap

mengindahkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih terikat oleh nilai-nilai tradisional yang tidak selalu mendukung kesiapan dan kematangan berpikir, bersikap dan bertindak secara terbuka dan maju, menghargai waktu, dan berani bersaing secara sehat. Budaya menulis, membaca, belajar, dan mengakrabkan diri dengan iptek belum tumbuh dengan subur pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, **tantangan keempat** yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan adalah bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan yang mempunyai daya untuk mengembangkan iptek guna mewujudkan kualitas bangsa yang maju dan mandiri bercirikan kepribadian Indonesia.

Penguasaan dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cermin diri berpikir logis dan sistematis sehingga dapat mendukung upaya menumbuhkan-kembangkan iptek. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia belum sepenuhnya digunakan masyarakat dengan baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga. Menurut sensus penduduk tahun 1990, dari penduduk usia lima tahun ke atas hanya sekitar 15% yang telah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sekitar 17% yang tidak memahami bahasa Indonesia, dan 68% yang telah memahami tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, juga ada keterbatasan dalam penerjemahan dan penulisan buku ilmiah, baik jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu, **tantangan kelima** yang dihadapi adalah bagaimana mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa

iptek seiring dengan penulisan dan penerbitan berbagai buku bermutu.

Pembinaan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah berhasil meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan telah dapat membina kerukunan antar umat beragama dan antar sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, masih terdapat kesulitan dalam membina para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar bersikap tidak mengarah pada pembentukan agama baru serta sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini juga merupakan **tantangan keenam** dalam pembangunan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Kendala

Upaya menjawab berbagai tantangan dalam PJPT II yang diawali dengan Repelita VI akan menghadapi berbagai kendala yang menghambat pembangunan kebudayaan nasional dan pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan sebagian masyarakat yang dapat mengakibatkan rendahnya daya saring dan daya tangkal terhadap pengaruh budaya asing yang negatif. Dalam pada itu, masyarakat berpendidikan rendah juga mengalami kesulitan untuk menyerap dan mengembangkan nilai-nilai baru yang positif sehingga pada

gilirannya dapat menghambat upaya mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri yang bercirikan kepribadian Indonesia.

Kedua, kurang mantapnya mekanisme penyaringan terhadap penetrasi budaya luar yang negatif, baik melalui siaran televisi maupun media massa lainnya.

Ketiga, masih lemahnya peran keluarga dalam menyemaikan, menumbuhkan, dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai agama sejak dini, yang antara lain disebabkan oleh terjadinya pergeseran pola hidup dan kurang siapnya masyarakat dalam menghadapi proses transformasi struktural dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri modern.

Keempat, masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga masih terdapat kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini akan menjadi lebih sulit apabila masyarakat yang lebih beruntung tidak mempunyai kepedulian dan kesetiakawanan sosial sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai luhur Pancasila sehingga dapat mengakibatkan timbulnya kecemburuan sosial yang merupakan kendala, bahkan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelima, sulitnya upaya penggalian, pengkajian, dan pelestarian benda cagar budaya, terutama untuk benda cagar budaya dan situs yang berada di daerah pedalaman dan/atau daerah terpencil.

Keenam, kurangnya tenaga teknis kebudayaan dan perpustakaan, baik jumlah maupun mutunya, berikut sarana

dan prasarana untuk mengembangkan kebudayaan dan perpustakaan.

Ketujuh, kendala khusus untuk membina penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masih terdapat sikap tertutup untuk memberikan informasi guna keperluan pembinaan.

3. Peluang

Walaupun terdapat beberapa kendala sebagaimana disebutkan di atas, dalam upaya pengembangan kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdapat berbagai peluang sebagai faktor pendukung. Peluang-peluang tersebut antara lain sebagai berikut.

- (1) Makin memasyarakatnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta makin mantapnya Wawasan Nusantara sebagai hasil kegiatan penataran P4.
- (2) Telah berkembangnya budaya bangsa yang dinamis yang bercirikan ke-unikan dan ke-ekaian bangsa.
- (3) Adanya corak ragam budaya bangsa yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang tak ternilai.
- (4) Meningkatnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendidikan yang dibuktikan dengan



meningkatnya angka partisipasi pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

- (5) Bangsa Indonesia telah berabad-abad memiliki kebudayaan dan daya toleransi yang tinggi sehingga mempunyai kemampuan untuk menyerap pengaruh budaya asing yang positif.
- (6) Makin meluasnya jangkauan penyebaran informasi, termasuk pelayanan perpustakaan yang dapat digunakan sebagai wahana penyebarluasan nilai-nilai luhur budaya dan iptek.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kebudayaan nasional sesuai dengan arahan GBHN, maka dalam PJPT II disusun serangkaian kebijaksanaan yang mengarah pada upaya yang bersifat preservasi dan pengembangan. Kebijakan tersebut meliputi bidang-bidang:

- (1) pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- (2) pembinaan kebahasaan, kesastraan, dan kepustakaan;
- (3) pembinaan kesenian;
- (4) pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman; dan
- (5) pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berikut disajikan uraian mengenai masing-masing pembinaan.

1. Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya bangsa perlu terus ditingkatkan dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Upaya ini dilaksanakan antara lain melalui identifikasi peranan budaya sebagai pembentuk jati diri bangsa dan pengembangan nilai-nilai budaya yang melandasi kreativitas, keberadaan, budi pekerti, dan akhlak mulia, tata krama, disiplin nasional, serta tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial. Selain itu, terus ditingkatkan upaya pembentukan masyarakat yang mempunyai sikap menghargai waktu, disiplin dan etos kerja produktif, kerja keras, dan berpikir kreatif melalui pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Upaya memperkaya pengetahuan budaya peserta didik, terutama pada tingkat pendidikan dasar dilakukan melalui pengkajian dan penerapan materi bahan pengajaran disertai dengan pengadaan buku pegangan bagi guru dan bahan bacaan untuk peserta didik yang bersumber pada adat istiadat, norma-norma, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Penyebarluasan informasi kebudayaan yang didukung dengan suatu sistem pengolahan informasi yang handal perlu terus dilakukan sehingga mampu menyediakan informasi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga setiap saat dapat memberikan layanan informasi kebudayaan untuk berbagai kepentingan nasional, regional, dan internasional. Dalam penyebaran informasi

kebudayaan tersebut juga dikembangkan komunikasi pemikiran budaya yang diarahkan untuk mempersiapkan pengembangan suatu masyarakat industri bagi warga negara Indonesia. Dalam hal ini, peran lembaga komunikasi baik pemerintah maupun masyarakat terus didorong dan ditingkatkan sehingga dapat menjalankan fungsinya secara sungguh-sungguh dalam memelihara dan mengembangkan peradaban bangsa sebagai pembentuk jati diri bangsa.

Kerjasama dan koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun swasta secara nasional, regional, dan internasional ditingkatkan terutama untuk meningkatkan citra budaya bangsa yang luhur dengan meningkatkan fungsi berbagai kekayaan budaya untuk mendukung pembangunan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui segenap bidang kehidupan dalam rangka memperluas cakrawala dan aspirasi budaya bangsa dan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa terus dibina dan dipacu ke arah yang positif dan dijiwai oleh sikap mawas diri, tahu diri, tenggang rasa, solidaritas sosial ekonomi serta tanggungjawab yang tinggi terhadap kebersamaan dan kesetiakawanan dalam upaya memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Penyelenggaraan terus diarahkan untuk mencegah dan/atau melebarnya kesenjangan ekonomi dan sikap eksklusif serta untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

2. Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan, dan Kepustakaan

Bahasa Indonesia sebagai pembentuk jati diri bangsa, baik sebagai bahasa resmi maupun sebagai bahasa nasional yang merupakan sarana komunikasi serta sarana pengembangan iptek dibina dan dikembangkan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar di berbagai lapisan masyarakat dan instansi baik pemerintah maupun swasta.

Di samping itu, penggunaan bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari pengetahuan budaya dilestarikan guna memperkaya khasanah budaya bangsa. Sehubungan dengan itu, diupayakan pengembangan mata pelajaran bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum pendidikan, terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia sebagai salah satu sumber kekayaan batin bangsa dalam rangka meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai budaya luhur lama dan baru demi pengembangan kebudayaan nasional perlu terus ditingkatkan. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah ditingkatkan untuk memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Dalam rangka ini didorong dan ditingkatkan partisipasi tenaga ahli dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.

Kemampuan penguasaan bahasa asing sebagai wahana penyerapan dan penguasaan iptek serta untuk memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan ditingkatkan melalui jalur sekolah dan luar sekolah. Dampak negatif penggunaan bahasa asing terhadap pembinaan bahasa Indonesia dihindari, antara lain dengan cara menghindari pemakaian kata atau istilah asing yang telah mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia dan menertibkan pemakaian bahasa asing agar sesuai dengan tempat dan kebutuhan.

Kesempatan membaca buku bagi masyarakat diperluas sehingga mendukung upaya mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan belajar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa menuju terwujudnya masyarakat yang makin berbudaya tinggi, maju dan mandiri. Sehubungan dengan itu, perpustakaan dan perpustakaan terus ditingkatkan agar lebih merata dan bermutu dan menjangkau segenap lapisan masyarakat termasuk masyarakat pedesaan. Upaya meningkatkan mutu perpustakaan dilakukan untuk semua jenis perpustakaan, antara lain dengan meningkatkan jumlah dan mutu perpustakaan dan mengembangkan kerjasama antar perpustakaan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan perpustakaan. Selain itu, diversifikasi fungsi perpustakaan dikembangkan dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas.

Sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, penerjemahan berbagai buku kebudayaan dan iptek berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia serta penerjemahan dari

bahasa Indonesia ke bahasa asing ditingkatkan guna meningkatkan wawasan budaya dan penguasaan iptek serta memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada negara lain.

3. Pembinaan Kesenian

Pembinaan kesenian diarahkan pada upaya menumbuhkan daya cipta kreatif yang dapat memperkaya khasanah kebudayaan nasional dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa, meningkatkan kebanggaan nasional, mengungkapkan kehalusan perasaan dan keindahan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesenian daerah, terutama yang hampir punah, perlu dibina dengan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian daerah dalam rangka melestarikan dan mengembangkan seni budaya bangsa. Dalam pada itu, pembinaan dan pengembangan kesenian masa kini diarahkan agar berakar kuat pada budaya luhur bangsa kita.

Pendidikan kesenian sebagai wahana untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional dilakukan melalui pendidikan sekolah, pameran, dan pementasan karya-karya seni dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan kreatif. Peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam membina dan mengembangkan kesenian perlu didorong dan ditingkatkan.

Dalam pada itu, pembinaan terhadap organisasi dan lembaga kesenian yang tumbuh di masyarakat ditingkatkan

dan diarahkan pada upaya menghasilkan karya seni bermutu dalam rangka memperkaya budaya bangsa.

Upaya meningkatkan citra kesenian Indonesia sebagai penunjang program kepariwisataan dan diplomasi bermatra kebudayaan perlu dilakukan, antara lain dengan cara menyebarkan informasi kesenian ke luar negeri dan tukar-menukar misi kesenian dengan negara lain.

4. Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Permuseuman

Upaya melestarikan dan melindungi berbagai bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sebagai kekayaan budaya dan kebanggaan nasional perlu ditingkatkan, antara lain melalui pengamalan dan perlindungan benda cagar budaya dari kemungkinan pengrusakan, pencurian, penyelundupan dan perdagangan benda tersebut. Untuk itu, kerjasama antar lembaga pemerintah dan swasta di dalam dan di luar negeri perlu terus dikembangkan.

Fungsi dan peranan museum dikembangkan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan benda peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, tetapi juga sebagai wahana penelitian dan pendidikan budaya serta pengenalan dan pemahaman mengenai jati diri bangsa terutama bagi generasi muda. Museum iptek juga dikembangkan dalam rangka penanaman dan pengembangan budaya iptek sejak dini.

Guna mengembangkan jiwa kejuangan dan kebanggaan nasional serta semangat cinta tanah air maka perlu dilakukan perekaman, penulisan dan penyebaran peristiwa

perjuangan dalam sejarah dan biografi para tokoh sejarah serta penulisan bahan ajaran sejarah yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan untuk keperluan pendidikan, baik di sekolah maupun luar sekolah.

5. Pembinaan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertujuan menghindari kecenderungan pembentukan agama baru dan untuk meng-efektifkan pengambilan langkah-langkah agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berlangsung menurut dasar-dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemeliharaan kerukunan antar dan antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih meningkatkan kesadaran dan peran aktif penganut akan tanggungjawabnya untuk secara bersama-sama memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

V. Program-program dalam Repelita VI

Dalam Repelita VI, subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai program-program sebagai berikut.

A. Program-program Pokok

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Program ini bertujuan mengungkapkan, menanamkan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Lingkup kegiatan yang akan dilakukan meliputi, antara lain inventarisasi, penelitian, pengkajian dan pengungkapan nilai-nilai budaya bangsa.

Kegiatan penelitian kebudayaan daerah yang akan dilakukan meliputi antara lain tata krama, disiplin, adat-istiadat dan nilai-nilai budaya rakyat, permainan rakyat, tanggung jawab dan keistimewaan sosial, dan norma sosial serta pandangan masyarakat. Hasil kegiatan tersebut akan dimanfaatkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, antara lain melalui media massa dan pranata sosial yang hidup di masyarakat dan lembaga pendidikan.

Dalam upaya mengembangkan kebudayaan masa kini yang berakar pada budaya bangsa akan dilakukan pelayanan informasi kepada masyarakat luas melalui pameran dan peragaan budaya serta penelitian dampak kebudayaan masa kini terhadap anak, remaja, pemuda, wanita, dan kehidupan keluarga. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan pengembangan nilai-nilai budaya yang mendukung produktivitas, efisiensi, dan etos kerja produktif dan pengembangan iptek dilakukan pembelajaran dan pengkajian budaya tentang pengembangan jati diri dan kepribadian bangsa, lomba dan sayembara penulisan naskah kebudayaan

serta festival kebudayaan bagi para remaja, pemuda, dan masyarakat luas. Selain itu, akan dikembangkan sistem informasi kebudayaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka merangsang kreativitas para budayawan dikembangkan iklim dan kondisi yang mendukung, antara lain dengan memberikan penghargaan kepada budayawan yang kreatif dan mampu menghasilkan karya budaya bermutu. Peran serta dunia usaha dalam hal ini didorong dan ditingkatkan.

2. Program Pembinaan Kebahasaan, Kesastraan, dan Kepustakaan

Program ini meliputi program-program pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan, pembinaan keputakaan, pembinaan kesenian, dan pembinaan tradisi, peninggalan sejarah, dan permuseuman.

a. Pembinaan dan Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan

Program ini bertujuan membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dalam upaya membina bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern yang dapat berperan sebagai sarana komunikasi nasional dan wahana pengembangan iptek. Program ini meliputi penelitian tentang berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah, serta penelitian dan



pengembangan sistem pengajaran bahasa dan sastra nasional, sastra daerah, dan sastra asing.

Upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan melalui pembakuan kebahasaan, penyempurnaan tata bahasa baku bahasa Indonesia, penyempurnaan dan penyusunan kamus, antara lain kamus iptek dan kamus bahasa daerah, bimbingan dan penyuluhan, serta pemberian penghargaan bagi karya bahasa dan sastra yang bermutu. Penulisan dan penerjemahan berbagai buku bahasa, sastra, dan iptek yang bermutu akan dilakukan dalam upaya mempercepat alih iptek dan memperkaya bahasa nasional, kesastraan, dan pustaka Indonesia.

Bahasa dan sastra daerah akan dibina dan dikembangkan, antara lain melalui pemetaan dan pelestarian bahasa daerah, peningkatan penghayatan dan penghargaan masyarakat terhadap karya sastra daerah, penyusunan naskah dan pengadaan buku bacaan sastra anak-anak yang mengandung nilai-nilai budaya dan sastra daerah dan Nusantara, lomba kesastraan bagi remaja, pemuda dan masyarakat luas, dan pemberian penghargaan karya sastra yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan penguasaan bahasa asing melalui jalur sekolah dan luar sekolah diupayakan penyediaan bahan tambahan untuk penelitian tenaga pendidik bahasa asing. Upaya mengurangi pengaruh negatif bahasa asing terhadap bahasa Indonesia akan dilakukan melalui penertiban pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan berbagai media massa.

b. Pembinaan Kepustakaan

Program ini bertujuan mengembangkan minat baca dan minat belajar masyarakat. Pada Repelita VI kegiatan yang dilakukan adalah memantapkan mutu pelayanan sistem nasional perpustakaan sehingga makin mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan perpustakaan desa, perpustakaan keliling, serta perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi. Di samping itu, ditingkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan melalui jaringan kerja sama lembaga perpustakaan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Pengembangan fungsi dan peran perpustakaan dilakukan terutama untuk mengembangkan minat belajar anak-anak dan remaja.

c. Program Pembinaan Kesenian

Program ini bertujuan menumbuhkan daya cipta anggota masyarakat, khususnya para seniman, memperluas apresiasi seni masyarakat, serta memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dan menikmati seni budaya bangsa. Untuk itu, akan dilakukan kerja sama pembinaan dan diupayakan pembinaan bantuan kepada organisasi kesenian serta penghargaan kepada seniman.

Pembinaan kesenian didukung oleh kegiatan penggalan, pengolahan, pendokumentasian, perekaman, dan penelitian kesenian dalam rangka melestarikan, memelihara, dan mengembangkan kesenian daerah dan kesenian nasional. Untuk itu, dilakukan pula kegiatan operasi dan perawatan fasilitas taman-taman budaya guna meningkatkan dayaguna

dan hasil guna. Sementara itu, dalam rangka peningkatan mutu diberikan bimbingan teknis, penyuluhan, pelatihan, dan temu seniman.

d. Program Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah, dan Permuseuman

1) Pengkajian dan Penanaman Kesadaran Sejarah

Program ini bertujuan mendukung upaya pembinaan kebudayaan nasional yang berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai kesejarahan yang tetap mempunyai dinamika yang tinggi. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini antara lain meliputi penelitian sejarah untuk mengungkapkan sejarah bangsa, pemikiran, dan keteladanan para tokoh masyarakat dan sejarah.

Penelitian kesejarahan bertujuan merekam dan menjernihkan masalah kesejarahan yang hidup dalam masyarakat dan antara lain dilakukan melalui pengungkapan nilai-nilai tradisi sejarah untuk memupuk kebanggaan nasional serta menghidupkan keteladanan para tokoh sejarah nasional. Dalam upaya mendukung pembinaan kesadaran sejarah bagi masyarakat dilakukan antara lain inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional dan daerah.

Mengingat pelajaran sejarah Indonesia mengenai kawasan timur Indonesia yang diajarkan di sekolah sangat terbatas maka dilakukan penelitian sejarah khusus untuk kawasan tersebut.

2) Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan

Program ini ditujukan pada pelestarian dan pemantaatan bukti-bukti peninggalan sejarah dan kepurbakalaan untuk menunjang program pendidikan guna mempertinggi rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional serta memperkaya budaya bangsa dan mendukung kegiatan pariwisata.

Dalam upaya melindungi dan memelihara obyek peninggalan sejarah dan purbakala dilakukan berbagai studi kelayakan, studi teknis, rehabilitasi, dan pemugaran terhadap bangunan di situs sejarah dan purbakala, seperti di kompleks percandian, masjid, gereja, pura, makam kuno, dan rumah adat.

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengolahan benda cagar budaya diberikan bimbingan, penyuluhan, ceramah, dan penyebaran informasi melalui media massa cetak dan elektronik.

Dalam upaya menggali dan menyelamatkan benda cagar budaya bawah air sebagai sumber daya budaya dan mata rantai sejarah yang sangat penting untuk memahami sejarah kemaritiman Indonesia akan dilakukan penelitian dan pengkajian serta upaya pengamanannya.

3) Pembinaan Permuseuman

Pembinaan permuseuman bertujuan meningkatkan peranan fungsi museum sebagai pusat penelitian, pendidikan,

dan rekreasi edukatif yang mendukung peningkatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional kepariwisataan, dan penanaman budaya iptek sejak usia dini.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi antara lain pemantapan sistem permuseuman dan pemasyarakatan peraturan tentang permuseuman, pelestarian dan pengembangan benda budaya, pengembangan museum nasional sebagai pusat studi warisan budaya dan pusat informasi sejarah agar mampu menjadi museum bertaraf internasional serta perintisan pengembangan museum iptek untuk mengembangkan budaya iptek sejak dini. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan pula kegiatan operasi dan perawatan untuk klasifikasi museum-museum propinsi.

4) Penelitian Purbakala

Penelitian purbakala bertujuan mengungkapkan data kepurbakalaan, menyelamatkan peninggalan budaya masa lampau sebagai dasar bagi upaya membuka cakrawala wawasan budaya bangsa. Kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi penggalian, penelitian, dan publikasi hasil-hasil penelitian.

e. Program Pembinaan Penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Program ini bertujuan membina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kehidupan kerukunan antar penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah inventarisasi dan dokumentasi ajaran-ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keimanan dan ketaqwaan dan kerukunan para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. Program-program Penunjang

1. Program Pembinaan Anak dan Remaja

Program pembinaan anak dan remaja bertujuan mempersiapkan anak dan remaja agar mengenal, mendalami dan menghayati nilai-nilai luhur budaya bangsa sejak usia dini guna memperkuat kepribadiannya. Program ini dilaksanakan melalui jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah termasuk pendidikan dalam keluarga dan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain berupa penyebaran cerita rakyat, peragaan budaya daerah, permainan rakyat yang sesuai dengan perkembangan anak dan remaja, serta bimbingan dan penyuluhan bagi keluarga dan masyarakat.

2. Program Pembinaan Pemuda

Program pembinaan pemuda bertujuan mempersiapkan generasi muda menjadi kader pimpinan bangsa yang tangguh, ulet, dan mandiri dalam menghadapi tantangan pembangunan serta bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negara serta mempunyai ketahanan budaya yang handal. Untuk itu, dilakukan kegiatan meningkatkan etos kerja, kemauan dan kesadaran memperkuat mental kejuangan

dan kepeloporan serta kepatriotan, mendorong aktivitas dan kreativitas seni pemuda, menumbuhkembangkan kesetiakawanan sosial, budaya gemar membaca dan rasa hormat terhadap generasi terdahulu, serta meningkatkan apresiasi dan sikap pemuda terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Untuk itu, dilakukan bimbingan, penyuluhan, ceramah, lomba, sayembara, pameran, dan peragaan budaya.

3. Program Peranan Wanita

Program ini bertujuan memperkuat jati diri wanita Indonesia sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan nasional sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui berbagai kegiatan pendidikan kebudayaan baik di sekolah dan luar sekolah maupun melalui media massa.

4. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Kebudayaan

Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan efektivitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan baik teknis maupun administratif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kebudayaan, serta meningkatkan wawasan budaya masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain mencakup pelatihan tenaga teknis kebudayaan dan perencanaan pengembangan sumber daya kebudayaan secara terpadu, serta penyuluhan kepada masyarakat, termasuk penyuluhan tentang perundang-undangan kebudayaan, seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan

Karya Cetak dan Karya Rekam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Lampiran

Menurut Keppres No. 15 Tahun 1984 tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ini berarti bahwa tugas pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara operasional, tugas pembinaan dan pembangunan kebudayaan nasional tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.

1. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Menurut Keputusan Mendikbud No. 0222e/O/1980 tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan pembinaan, serta perizinan di bidang

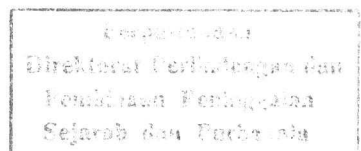
kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Melaksanakan pembinaan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai cakupan pengertian sangat luas. Sesuai Keputusan Menteri seperti tersebut di atas, bidang-bidang kebudayaan yang dibina dan dikembangkan sebagai penjabaran tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup:

- a. bidang Sejarah
- b. bidang Nilai-nilai Budaya
- c. bidang Kesenian
- d. bidang Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Benda Cagar Budaya)



- e. bidang Permuseuman
- f. bidang Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- g. bidang Kebahasaan dan Kesastraan, serta
- h. bidang Arkeologi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan didukung oleh unit-unit kerja sebagai berikut.

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan (Sesditjenbud);
- (2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra);
- (3) Direktorat Kesenian (Ditni);
- (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
- (5) Direktorat Permuseuman (Ditmus);
- (6) Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- (7) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusbinbangsa);
- (8) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarken)
- (9) Museum Nasional.

Di samping itu Direktorat Jenderal Kebudayaan juga didukung oleh 76 buah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: Museum Nasional 1 buah, Museum Negeri Propinsi 25 buah, Museum Khusus 4 buah, Taman Budaya 23 buah, Suaka

Peninggalan Sejarah dan Purbakala 9 buah, Balai Konservasi Borobudur 1 buah, Balai Penelitian Bahasa 3 buah, Balai Arkeologi 5 buah, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 6 buah, yang tersebar di seluruh propinsi.

Sedangkan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibantu oleh Bidang Kesenian, Bidang Museum dan Kepurbakalaan, serta Bidang Sejarah Nilai Tradisional. Di tingkat Kabupaten dan Kecamatan masing-masing dibantu oleh Kepala Seksi Kebudayaan dan Penilik Kebudayaan.

[illegible]

Perpustakaan
Jenderal